

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN
SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR)
ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD)
TERHADAP IMPOR PRODUK *BIAXIALLY ORIENTED*
***POLYPROPYLENE (BOPP)* YANG BERASAL THAILAND DAN**
VIETNAM

VERSI TIDAK RAHASIA

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

2024

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

DAFTAR ISI

A. PROSEDUR	2
B. BARANG YANG DISELIDIKI DAN BARANG SEJENIS.....	5
C. INDUSTRI DALAM NEGERI DAN <i>STANDING PETITIONER</i>	8
D. PASAR DOMESTIK BARANG YANG DISELIDIKI.....	8
E. KINERJA INDUSTRI DALAM NEGERI.....	10
F. PENENTUAN MARGIN DUMPING EKSPORTIR (SRF INDUSTRIES (THAILAND) LTD) DALAM KERANGKA INTERIM REVIEW (IR).....	14
G. FAKTOR <i>CONTINUATION</i> ATAU <i>RECURRENCE LIKELIHOOD</i> TERJADINYA DUMPING DAN KERUGIAN	17
G.1 MASIH DITEMUKANNYA DUMPING	17
G.2 PERKEMBANGAN VOLUME DAN HARGA IMPOR.....	18
G.3 EXCESS CAPACITY DI NEGARA YANG DIKENAKAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD).....	21
G.4 PENGENAAN <i>TRADE REMEDIES</i> OLEH OTORITAS NEGARA LAIN TERHADAP EKSPOR NEGARA YANG DITUDUH DUMPING.....	22
G.5 PERKEMBANGAN EKSPOR NEGARA DUMPING.....	23
H. FAKTOR LAIN.....	24
H.1 PERKEMBANGAN EKSPOR PEMOHON	24
H.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI NASIONAL	25
H.3 TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN	25
I. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN.....	26

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM
REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD)
TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE
(BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

A. PROSEDUR

1. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap barang impor *Biaxially Oriented Polypropylene* (BOPP) yang berasal dari Thailand dan Vietnam ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 2 April 2019 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.010/2019. Pengenaan BMAD dimaksud berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 17 April 2019, dan akan berakhir pada tanggal 16 April 2024 dengan besaran sebagai berikut:

Tabel 1. Besaran Pengenaan BMAD

No.	Negara	Nama Perusahaan	Besaran BMAD (%)
1.	Thailand	A.J. Plast Public Company Limited	Tidak Dikenakan Bea Masuk Anti Dumping
		Perusahaan Lainnya	28,4
2.	Vietnam	Formosa Industries Corporation	3,9
		Perusahaan Lainnya	3,9

Sumber: PMK No. 36/PMK.010/2019

2. PT. Trias Sentosa Tbk. (Trias) dan PT Argha Karya Prima Industri Tbk (Argha), produsen BOPP dalam negeri, mengajukan permohonan perpanjangan pengenaan BMAD terhadap BOPP yang berasal dari Thailand dan Vietnam atau penyelidikan *Sunset Review* (SR), dengan alasan masih belum pulihnya kerugian perusahaan akibat masih berlanjutnya praktik dumping yang dilakukan oleh eksportir dan eksportir produsen BOPP di negara-negara tersebut.
3. Pada saat yang bersamaan, KADI juga menerima permohonan penyelidikan *Interim review* (IR) atas permintaan eksportir produsen asal Thailand yaitu SRF Industries (Thailand) Ltd. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat 1(b), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011), eksportir dan/atau eksportir produsen yang tidak melakukan ekspor barang dumping sebelum pengenaan BMAD dan tidak berafiliasi dengan eksportir dan/atau eksportir produsen yang dikenakan BMAD, dapat mengajukan permohonan IR.

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM
REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD)
TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE
(BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

4. Sesuai amanat PP 34/2011, KADI melakukan pre-notifikasi kepada perwakilan pemerintah Thailand dan Vietnam di Indonesia pada tanggal 17 Maret 2023 tentang diterimanya permohonan penyelidikan SR pengenaan BMAD terhadap impor BOPP yang berasal dari Thailand dan Vietnam dari produsen BOPP dalam negeri (Industri Dalam Negeri) dan permohonan penyelidikan IR dari SRF Industries (Thailand) Ltd.
5. Setelah melakukan analisa bukti awal pada permohonan dan sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 PP 34/2011 dan Pasal 11.3 *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (Anti Dumping Agreement/ADA)*, KADI mengumumkan dimulainya penyelidikan SR dan IR pada tanggal 29 Maret 2023, terhadap Pengenaan BMAD BOPP yang berasal dari Thailand dan Vietnam melalui Harian Bisnis Indonesia. Pengumuman tersebut disampaikan secara resmi kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan disertai pengiriman kuesioner kepada industri dalam negeri, eksportir/eksportir produsen, dan importir yang diketahui. KADI juga menginformasikan bahwa kesempatan untuk menyampaikan tanggapan tertulis dan mengajukan dengar pendapat (*hearing*) diberikan kepada pihak yang berkepentingan.
6. Pihak yang berkepentingan yang diketahui dalam permohonan penyelidikan SR maupun IR adalah:
 - a. Eksportir/Eksportir Produsen Thailand: A.J. Plast Public Co. Ltd dan SRF Industries (Thailand) Ltd.
 - b. Eksportir/Eksportir Produsen Vietnam: Formosa Industries Corporation
 - c. Importir
 - i. PT Supernova
 - ii. PT Putra Mandiri Intipack
 - iii. PT Surabaya Perdana Rotopak
7. Sesuai resital 5, KADI memberikan batas waktu penyampaian jawaban kuesioner kepada masing-masing pihak yang berkepentingan. Namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, tidak seluruh pihak yang berkepentingan kooperatif dan menyampaikan jawaban kuesioner. Para pihak yang kooperatif menyampaikan jawaban kuesioner adalah:
 - a. Industri Dalam Negeri:
 - i. PT Argha Karya Prima Industry Tbk

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM
REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD)
TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE
(BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

- ii. PT Trias Santosa, Tbk
 - b. Eksportir Produsen Thailand:
 - iii. A.J. Plast Co., Ltd
 - iv. SRF Industries (Thailand) Ltd (SRF)
 - c. Importir: PT Supernova Flexible Packaging.
8. Sehubungan dengan tidak adanya pihak yang berkepentingan dari Vietnam yang menyampaikan jawaban kuesioner, penyelidikan terkait impor dumping dari negara tersebut, dilakukan sesuai dengan *Article 6.8* dan *Annex II ADA*. Dalam hal ini, KADI menggunakan data terbaik yang dimiliki atau *Best Information Available (BIA)*, termasuk data dan informasi yang disampaikan oleh IDN dalam Permohonannya.
9. KADI melakukan verifikasi lapangan ke lokasi IDN pada:
- a. PT Argha Karya Prima Industry Tbk pada tanggal 26-28 Juli 2023; dan
 - b. PT Trias Santosa, Tbk pada tanggal 9-11 Agustus 2023.
10. KADI melakukan verifikasi lapangan ke lokasi SRF Industries (Thailand) Ltd (SRF) pada 29 September-1 Oktober 2023.
11. Periode penyelidikan kerugian dalam penyelidikan ini adalah 4 tahun yaitu: 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019, 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020, 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021, 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022, dan periode penyelidikan dumping adalah 1 tahun (1 Januari 2022 – 31 Desember 2022).
12. Sesuai dengan *Article 6.9 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (ADA)*, pada tanggal 27 Desember 2023, KADI menerbitkan Laporan Data Utama (*Essential Facts*) hasil penyelidikan SR dan IR atas Pengenaan BMAD terhadap impor BOPP asal Thailand dan Vietnam, telah disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk diminta tanggapan atau masukan.
13. Berdasarkan *Article 6.2 ADA* dan Pasal 13 PP 34/2011, KADI memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan tanggapan secara lisan terhadap laporan data utama. Pada tanggal 7 Februari 2024, KADI mengadakan dengar pendapat dengan seluruh pihak yang berkepentingan dan pada tanggal 12 Februari 2024 atas permintaan Pemohon dan asosiasi produsen dalam

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM
REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD)
TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE
(BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

negeri yaitu ABOFI dilakukan dengan pendapat khusus untuk menanggapi penyelidikan IR.

14. Selanjutnya, sesuai ketentuan pada Pasal 10 ayat 1 PP 34/2011 dan *Article 12.2* ADA, KADI menerbitkan Laporan Akhir Hasil Penyelidikan SR dan IR atas Pengenaan BMAD terhadap impor BOPP asal Thailand dan Vietnam yang menjadi dasar bagi KADI dalam menyampaikan rekomendasi kepada Menteri terkait Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk BOPP yang berasal dari Thailand dan Vietnam.

B. BARANG YANG DISELIDIKI DAN BARANG SEJENIS

15. Barang yang diselidiki adalah *Biaxially Oriented Polypropylene* (BOPP) dalam bentuk pelat, lembaran, film, foil dan bentuk lainnya yang diimpor atau berasal dari Thailand dan Vietnam.
16. Berdasarkan uraian barang yang terdapat dalam BTKI 2022, barang yang diselidiki termasuk dalam pos tarif 3920.20.10.00 dan ex. 3920.20.90.00 sesuai dengan BTKI 2022 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Uraian Pos Tarif sesuai BTKI 2022

Pos Tarif	Uraian Barang
39.20	Pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain.
3920.20	- Dari <i>polimer propilena</i> :
3920.20.10	- - <i>Biaxially oriented polypropylene</i> (BOPP) film
3920.20.91	- - - Plat dan lembaran
Ex. 3920.20.99	- - - Lain – lain

Sumber: BTKI 2022

Bahan Baku

17. Bahan baku dari BOPP adalah *Resin Polypropylene* (PP) dan *Master Batch* (*Silica* dan *Amine*).

Proses Produksi

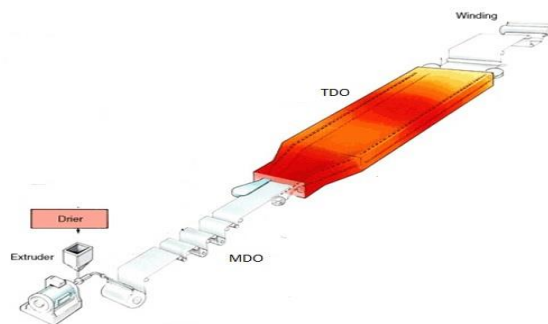
LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM
REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD)
TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE
(BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

18. *Resin Polypropylene* dan *master batch* dicampur menurut perbandingan tertentu, dan selanjutnya campuran tersebut dimasukkan ke dalam mesin *extruder* yang dilelehkan dengan suhu berkisar antara 225 – 285 derajat celcius, kemudian setelah melalui filter, lelehan resin tersebut ditekan masuk ke dalam *die* untuk dibentuk menjadi lembaran tebal yang yang panas. Selanjutnya, lembaran tersebut didinginkan melalui roll pendingin dengan suhu berkisar antara 30 - 50 derajat celcius, lalu dipanaskan ulang dan ditarik memanjang dengan rasio 5 kali, dengan tetap dipanaskan. Kemudian, lembaran itu ditarik lagi ke arah melebar dengan rasio 10 kali sehingga menghasilkan lembaran tipis 6 – 8 meter dan selanjutnya lembaran tipis tersebut kemudian didinginkan agar dapat dicetak, lembaran tipis tersebut dilewatkan *corona station* dengan tujuan untuk menaikkan tegangan permukannya (*dyne level*) yang kemudian digulung dan dilakukan *aging* (didiamkan) selama beberapa hari dan setelah itu, lembaran tipis dengan lebar 6-8 meter tersebut dipotong sesuai dengan lebar dan panjang yang diminta oleh konsumen.
19. Proses produksi BOPP menggunakan bahan baku utama biji plastik *Polypropylene*. Pada proses pembuatannya, biji plastik *Polypropylene* ini ditambahkan dengan aditif yang disesuaikan dengan jenis produk yang akan dibuat. Dalam prosesnya, biji plastik *Polypropylene* yang telah dicampur dengan aditif dimasukkan ke dalam mesin *extruder* untuk kemudian dipanaskan dan dilebur serta dipompakan secara terus menerus ke dalam mesin pencetak yang disebut *die*. *Die* ini akan mencetak lembaran plastik yang masih tebal dan tidak terputus-putus. Lembaran plastik yang melalui *die* ini masih dalam kondisi panas dan selanjutnya didinginkan dengan roll pendingin (*chill roll*) di dalam *water batch*. Pada proses selanjutnya, lembaran plastik tersebut dibentangkan dan ditarik secara memanjang (*machine direction orienter*) dengan cara dilewatkan pada roll yang memiliki kecepatan berbeda sehingga lembaran plastik menjadi lebih panjang dari semula. Lalu lembaran plastik tersebut ditarik secara melebar (*transversal direction orienter*) dengan cara menjepit sisi kiri dan kanan lembaran plastik dengan klip yang mana klip tersebut bergerak ke masing-masing ke arah menjauh sehingga terjadi penarikan arah melebar. Pada tahap ini proses orientasi telah selesai dan karena itu pula produk ini disebut BOPP karena *Polypropylene* ini dua kali diorientasi ke arah berbeda. Setelah itu, lembaran plastik ini digulung dalam ukuran yang besar yang disebut jumbo. Jumbo ini

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

kemudian disimpan di gudang yang disebut tahap aging. Tahap aging ini diperlukan untuk menstabilkan rantai polimer yang mengalami orientasi dan untuk memberikan waktu kepada aditif agar bermigrasi ke permukaan film. Setelah itu jumbo dipotong dengan mesin *slitter* sesuai dengan ukuran yang diinginkan oleh pelanggan.

Gambar 1. Proses Produksi BOPP



Kegunaan

20. BOPP digunakan sebagai bahan dasar bagi kemasan fleksibel, kemasan makanan cepat saji, makanan ringan, dan lain-lain. Selain itu, BOPP juga digunakan sebagai bahan dasar untuk industri pita perekat (*adhesive tape*) dan *garment bag*.
21. Dalam hal teknologi, secara umum IDN menggunakan teknologi yang sama seperti teknologi yang digunakan oleh eksportir produsen yang diselidiki. IDN mampu memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diselidiki sesuai dengan teknologi yang digunakan. Dengan teknologi yang digunakan, kualitas produksi IDN dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri.
22. BOPP yang diproduksi oleh IDN merupakan produk sejenis maupun menyerupai (*closely resembling*) dengan BOPP yang diimpor dari Thailand dan Vietnam karena memiliki kesamaan antara lain dalam hal bahan baku, proses produksi, karakter fisik, teknologi, dan kegunaan.

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM
REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD)
TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE
(BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

C. INDUSTRI DALAM NEGERI DAN *STANDING PETITIONER*

Tabel 3. Produksi Pemohon Tahun 2022

No	Keterangan	%
1	Total Produksi Pemohon	52,4
2	Total Pendukung	47,6
3	Total Produksi Nasional	100

Sumber: Pemohon, diolah

23. Berdasarkan Tabel 3 di atas, tampak jelas bahwa total produksi Pemohon sebesar 52,4% dari total produksi nasional dan telah mendapatkan dukungan dari industri dalam negeri barang sejenis lainnya sebesar 47,6%. Dengan demikian Pemohon dan Pendukung dinyatakan sudah memenuhi persyaratan *Article* 5.4 ADA dan Pasal 4 dan Pasal 6 PP 34/2011 untuk dapat mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) dalam penyelidikan anti dumping.

D. PASAR DOMESTIK BARANG YANG DISELIDIKI

24. Sesuai dengan PMK No. 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, besaran tarif bea masuk impor *Most Favored Nation* (MFN) untuk 3 (tiga) pos tarif BOPP adalah 15%. Berdasarkan PMK No.46/PMK. 010/2022 tentang Penetapan Tarif bea Masuk ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA), tarif preferensi (*preferential tariff*) untuk impor 3 (tiga) pos tarif yang berasal dari Thailand dan Vietnam adalah 0%.

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

Tabel 4. Perkembangan Konsumsi Nasional

						Indeks
No	Uraian	2019	2020	2021	2022	Tren (%)
1	IDN	32	32	29	33	1,3
2	Industri dalam negeri lainnya	43	46	43	39	(2,2)
3	Total Penjualan Nasional	75	77	72	72	(0,7)
4	Thailand	1	1	3	3	95,0
5	Vietnam	5	3	4	4	(2,2)
6	Total Impor Dumping	6	4	7	7	16,4
7	Impor negara lainnya	19	19	21	21	5,1
8	Total Impor	25	23	28	28	7,5
9	Konsumsi Nasional	100	100	100	100	1,4

Sumber: Badan Pusat Statistik; Jawaban Kuesioner IDN. Diolah.

25. Pada Tabel 4 ditunjukkan perkembangan konsumsi nasional BOPP di Indonesia yang diperoleh dari impor, penjualan IDN, dan penjualan industri dalam negeri lainnya. Selama periode tahun 2019-2022, konsumsi nasional BOPP konsisten meningkat dengan tren 1,4%, dan konsumsi pada tahun 2022 mencapai xxx MT.
26. Dalam laporan ini, perhitungan konsumsi nasional dilakukan dengan menjumlahkan volume penjualan dalam negeri IDN, industri dalam negeri lainnya, volume impor dari negara yang dituduh, dan impor negara lainnya. Pada saat konsumsi nasional mengalami peningkatan dengan tren sebesar 1,4%, impor BOPP dari Thailand mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 95% yang disebabkan adanya produsen baru yang memproduksi BOPP pada Juli 2021. Bahkan peningkatan impor BOPP yang lebih tinggi lagi (425%) terjadi pada periode 2020-2021 dimana pada tahun 2020 sebesar 1.216 MT menjadi 6.382 MT pada tahun 2021. Sebaliknya, selama periode penyelidikan impor dari Vietnam mengalami penurunan dengan tren sebesar 2,2%. Sehingga secara total impor BOPP dari negara yang dituduh dumping mengalami peningkatan dengan tren sebesar 16,4%. Pada periode penyelidikan tersebut, penjualan dalam negeri IDN relatif stabil (naik 1,3% selama periode penyelidikan, lihat Tabel 5 dan 6), sedangkan penjualan industri dalam negeri lainnya mengalami penurunan dengan tren sebesar 2,2%. Dalam hal ini, peningkatan permintaan di dalam negeri, tidak dapat dinikmati industri dalam negeri, melainkan dinikmati oleh impor, utamanya dari Thailand. Memperhatikan situasi ini, tampaknya pengenaan BMAD atas impor BOPP dari kedua negara tersebut,

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

khususnya dari Thailand tidak efektif dalam memperbaiki kinerja penjualan industri dalam negeri secara keseluruhan. Tampaknya praktek circumvensi terjadi di Thailand dengan memanfaatkan eksportir yang tidak dikenakan BMAD (A.J. Plast Public Company Limited). Hal ini didukung oleh importasi dari eksportir tersebut meningkat dari xxx MT sebelum pengenaan BMAD menjadi xxx MT atau meningkat 90% (pada tahun 2022) setelah pengenaan BMAD sejak tahun 2017.

E. KINERJA INDUSTRI DALAM NEGERI

27. Sesuai dengan *Article* 11.3 ADA, KADI melakukan penyelidikan *sunset review* (SR) mengenai kemungkinan berlanjut atau berulangnya dumping atau kemungkinan berlanjut atau berulangnya kerugian IDN (*continuation and recurrence likelihood*).
28. Mengingat data kerugian IDN dan angka-angka dalam setiap indikator dalam Tabel 5 di bawah ini bersifat sensitif secara komersial, maka data kerugian tersebut disajikan dalam bentuk indeks. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa beberapa indikator kinerja IDN menunjukkan perbaikan kecuali arus kas dan kemampuan meningkatkan modal menunjukkan tren penurunan selama periode penyelidikan.
29. Pada Tabel 5 ditunjukkan data indikator kinerja IDN selama periode penyelidikan tahun 2019-2022 yang telah diverifikasi. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa volume penjualan yang meningkat dengan tren 1,3% selama periode penyelidikan (meski volume penjualan pada tahun 2021 mengalami penurunan) yang diikuti dengan harga penjualan (harga domestik) yang juga mengalami peningkatan dan pada level yang lebih tinggi dari HPP, kondisi ini membuat IDN dapat meraih laba operasional dengan tren 17,8%. Hal ini menunjukkan bahwa operasional perusahaan dalam memproduksi BOPP mengalami pertumbuhan yang cukup positif.

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

Tabel 5. Indikator Kinerja IDN

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	Tren (%)
1	Penjualan domestik	100	94	114	115	6,3
2	Penjualan domestik	100	103	99	105	1,3
3	Harga Domestik	100	92	114	109	4,9
4	Harga Pokok Penjualan (HPP)	100	90	108	107	3,9
5	Laba operasional	100	132	224	145	17,8
6	Produksi	100	110	114	126	7,6
7	Pangsa Pasar	100	100	89	115	(0,1)
8	Kapasitas terpasang	100	100	117	117	6,3
9	Utilisasi kapasitas	100	110	98	108	1,1
10	Persediaan	100	68	70	86	(4,1)
11	Tenaga kerja	100	99	96	113	3,4
12	Produktivitas	100	111	119	111	4,0
13	Upah	100	110	128	155	15,8
14	Arus kas	100	124	3	44	(46,5)
15	ROI	100	97	223	210	35,8
16	Pertumbuhan (asset)	100	-556	1622	744	-
17	Kemampuan meningkatkan modal	100	85	95	95	(0,4)

Sumber: IDN, diolah.

30. Menurunnya volume penjualan pada tahun 2021 merupakan konsekuensi dari peningkatan biaya produksi atau HPP yang terjadi pada tahun tersebut. Namun karena harga jual domestik bisa ditingkatkan selama periode penyelidikan dan mencapai level tertinggi pada tahun 2021, pada saat volume penjualan paling rendah, namun laba operasional mencapai nilai tertinggi. Pada tahun 2022, laba operasional IDN mengalami penurunan signifikan (35%), dari 224 poin indeks pada tahun 2021 menjadi 145 poin indeks pada tahun 2022.

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

Tabel 6. Penjualan Domestik, Harga Domestik, HPP, Laba

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	Tren (%)
1	Produksi	100	110	114	126	7,6
2	Penjualan Domestik IDN	100	103	99	105	1,3
3	Harga Domestik	100	92	114	109	4,9
4	HPP	100	90	108	107	3,9
5	Laba operasional	100	132	224	145	17,8

31. Strategi penurunan harga jual IDN pada tahun 2022 yang lebih besar daripada penurunan harga pokok penjualannya, dimana harga jual IDN turun dari 114 poin indeks pada tahun 2021 menjadi 109 poin indeks pada tahun 2022, sedangkan harga pokok penjualan dari 108 poin indeks menjadi 107 poin indeks. Hal ini merupakan strategi untuk dapat mempertahankan volume penjualannya mengingat produksi yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun (tren peningkatan selama periode penyelidikan sebesar 7,6%).

Tabel 7. Produksi Nasional, Penjualan Domestik, Pangsa Pasar, Konsumsi Nasional dan Laba Operasional

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	Tren (%)
1	Produksi Nasional	100	109	111	120	5,8
2	Penjualan Domestik IDN	100	103	99	105	1,3
3	Pangsa Pasar IDN	100	106	115	118	5,9
4	Konsumsi Nasional	100	102	111	102	1,4
5	Laba operasional	100	132	224	145	17,8

Sumber: IDN, diolah.

32. Pada Tabel 7 di atas terlihat bahwa selama periode tahun 2019-2022, konsumsi nasional mengalami peningkatan sebesar 1,4% sedangkan volume penjualan IDN relatif stabil atau naik dengan tren 1,3%. Bahkan pada tahun 2021, di saat konsumsi nasional meningkat sebesar 7,7%, atau naik dari 102 poin indeks pada tahun 2020 menjadi 111 poin indeks pada tahun 2021, volume penjualan IDN mengalami

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

penurunan sebesar 3%, dari 103 poin indeks pada tahun 2020 menjadi 99 poin indeks pada tahun 2021.

33. Produksi Nasional mengalami tren peningkatan sebesar 5,8%, namun penjualan IDN hanya mengalami peningkatan sebesar 1,3%. Jika dibandingkan dengan Konsumsi Nasional, terlihat bahwa industri dalam negeri mampu memproduksi untuk keseluruhan kebutuhan nasional, namun pangsa pasar IDN hanya mampu mengisi sekitar 30% dari kebutuhan nasional sepanjang periode penyelidikan.

Tabel 8. Produksi, Utilisasi Kapasitas, Persediaan, dan Kapasitas Terpasang

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	Tren (%)
1	Produksi	100	110	114	126	7,6
2	Utilisasi Kapasitas	100	109	98	107	1,1
3	Persediaan	100	68	70	86	(4,1)
4	Kapasitas Terpasang	100	100	117	117	6,3

Sumber: IDN, diolah.

34. Kinerja produksi IDN selama periode tahun 2019-2022, mengalami peningkatan dengan tren sebesar 7,6%, namun demikian, utilisasi kapasitas IDN relatif stabil (55%-59,3%). Peningkatan produksi terjadi seiring dengan peningkatan kapasitas terpasang dengan tren sebesar 6,3% (Tabel 8). IDN meningkatkan kapasitas terpasangnya dengan teknologi terkini sebagai strategi untuk meningkatkan kemampuan produksi BOPP agar dapat memenuhi permintaan dalam negeri yang semakin berkembang.

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM
REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD)
TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE
(BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

Tabel 9. Produksi, Produktivitas, Tenaga Kerja, Upah dan Laba

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	Tren (%)
1	Produksi	100	110	114	126	7,6
2	Penjualan Domestik IDN	100	103	99	105	1,3
3	Produktivitas	100	111	119	111	4,0
4	Tenaga Kerja	100	99	96	113	3,4
5	Upah	100	110	128	155	15,8
6	Laba operasional	100	132	224	145	17,8

Sumber: IDN, diolah.

35. Produktivitas IDN juga mengalami peningkatan selama periode tahun 2019 – 2022 dengan tren sebesar 4,0%. Kondisi ini menunjukkan bahwa IDN dapat melakukan produksi dengan lebih efisien, selain itu, IDN telah mampu meningkatkan upah dan tenaga kerjanya dengan tren masing – masing sebesar 15,8% dan 3,4%.
36. Peningkatan produktivitas selama periode penyelidikan sebesar 4,0% yang diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 3,4% mengakibatkan Perusahaan harus membayar upah tenaga kerja yang meningkat dengan tren sebesar 15,8% (Tabel 9). Peningkatan upah tenaga kerja yang cukup tinggi ini menjadi beban bagi Perusahaan khususnya terlihat pada tahun 2022 karena meskipun hasil penjualan meningkat, tidak mampu memberikan laba operasional yang diharapkan. Upaya Perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan karena produksi yang cukup tinggi (xxx MT), bahkan tertinggi selama periode penyelidikan, hanya dapat dilakukan dengan menurunkan harga jual domestiknya (lihat Tabel 6). Upaya IDN untuk meningkatkan laba operasional dengan meningkatkan produksi dan menambah jumlah tenaga kerja tampak menjadi kurang efektif karena harus berhadapan dengan impor yang meningkat dari Thailand dan Vietnam khususnya pada periode 2021-2022. Peningkatan volume impor dari kedua negara yang dikenakan BMAD tersebut sangat signifikan dibandingkan dengan volume impor dari kedua negara tersebut pada tahun 2020, peningkatannya lebih dari 100% (lihat

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

Tabel 4). Kondisi ini merupakan tekanan yang cukup signifikan yang dihadapi IDN sehingga mengalami penurunan laba operasional sebesar 35% dalam periode tersebut.

F. PENENTUAN MARGIN DUMPING EKSPORTIR (SRF INDUSTRIES (THAILAND) LTD) DALAM KERANGKA *INTERIM REVIEW* (IR)

37. Sesuai dengan pasal 31 ayat 1 huruf d PP 34/2011, KADI melakukan penyelidikan *interim review* untuk menentukan besaran margin dumping individual terhadap salah satu Perusahaan asal Thailand yaitu SRF Industries (Thailand) Ltd yang saat penyelidikan awal (original) tidak/belum melakukan ekspor ke Indonesia dan tidak terafiliasi dengan eksportir yang diketahui pada penyelidikan awal (original)..
38. Dalam melakukan perhitungan margin dumping, KADI menggunakan data yang diperoleh dari jawaban SRF Industries (Thailand) Ltd . Margin dumping secara umum ditetapkan berdasarkan selisih antara harga normal (harga penjualan di dalam negeri) dengan harga ekspor pada saat penyerahan dan tingkat perdagangan yang sama (harga eks pabrik).

Uji Profitabilitas dan Harga Pokok Penjualan (HPP)

39. Pada umumnya, KADI menerima pengalokasian biaya sepanjang pengalokasian tersebut mencerminkan biaya produksi, biaya penjualan dan administrasi umum yang didukung oleh data dalam laporan keuangan SRF Industries (Thailand) Ltd. Namun, apabila pengalokasian biaya tersebut dinilai tidak mencerminkan biaya yang sebenarnya, maka dilakukan penyesuaian yang dianggap wajar. Penyesuaian tersebut akan disampaikan kepada produsen atau eksportir produsen yang bersangkutan.
40. Perhitungan margin dumping yang dilakukan oleh KADI terhadap SRF Industries (Thailand) Ltd disampaikan secara terpisah kepada perusahaan yang bersangkutan sebagai lampiran dari laporan data utama ini.

Nilai Normal

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

41. Nilai normal secara umum ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari transaksi penjualan domestik selama periode penyelidikan.
42. Nilai normal dihitung berdasarkan data yang disampaikan oleh SRF Industries (Thailand) Ltd , yaitu data penjualan dan data *allowances* yang diusulkan sebagaimana disampaikan dalam jawaban kuesioner. Penjualan domestik dapat dipergunakan dalam perhitungan nilai normal apabila memenuhi persyaratan perdagangan yang wajar (*ordinary course of trade*). Nilai normal ditentukan pada saat penyerahan barang di pabrik (*ex-factory*).
43. *Allowances* yang diajukan oleh SRF Industries (Thailand) Ltd yang dapat diterima adalah yang terkait dengan biaya penjualan langsung (*direct selling expense*), dan dapat ditelusuri dalam data perusahaan terkait dengan penjualan barang yang diselidiki. Secara umum *allowances* dapat diterima jika merupakan bagian dari biaya penjualan dari barang yang diselidiki, yang umumnya diklasifikasikan dalam biaya penjualan, umum dan administrasi (*selling, general and administrative expenses*).
44. Dalam perhitungan nilai normal, data penjualan SRF Industries (Thailand) Ltd dapat digunakan apabila total volume penjualan domestik lebih dari 5% dari total volume penjualan ekspor ke Indonesia, dan apabila volume penjualan yang menguntungkan kurang dari 20% maka transaksi tersebut diabaikan dan digunakan metode konstruksi. Apabila volume penjualan yang menguntungkan lebih dari 20% sampai dengan 80%, maka hanya transaksi yang menguntungkan yang digunakan dalam perhitungan nilai normal, dan apabila lebih dari 80%, seluruh transaksi penjualan digunakan dalam perhitungan nilai normal.
45. Jika ada penjualan ekspor untuk kode kontrol barang (KKB) tertentu, namun tidak dijual di domestik, maka nilai normal dikonstruksi (*constructed normal value*) berdasarkan biaya produksi untuk KKB tertentu, biaya penjualan, biaya umum dan biaya administrasi domestik, serta keuntungan yang wajar.

Harga Ekspor

46. Harga ekspor bagi SRF Industries (Thailand) Ltd, ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor ke Indonesia selama Periode Penyelidikan yang telah dikurangi dengan *allowances* yang dapat diterima dan biaya

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM
REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD)
TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE
(BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

yang terkait dengan penjualan langsung yang diajukan dan diyakini kebenarannya. Harga ekspor dilakukan pada tingkat eks-pabrik.

47. Margin Dumping

- 1) Perhitungan nilai normal dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner dan permintaan data tambahan. Dalam melakukan penjualan domestik, dilakukan secara langsung kepada pelanggan tanpa melalui perusahaan terafiliasi. Dengan demikian perhitungan nilai normal perusahaan ini menggunakan data penjualan domestik dikurang *allowances* yang diajukan dan dapat diterima sehingga didapatkan harga domestik eks-pabrik. Selanjutnya, terdapat 1 jenis BOPP yang perhitungan nilai normalnya dilakukan dengan metode konstruksi karena ditemukan total volume penjualan domestik yang menguntungkan untuk jenis tersebut, kurang dari 20%. Metode konstruksi nilai normal untuk kondisi tersebut dilakukan dengan cara menambah Harga Pokok Penjualan Domestik (HPPDM) jenis BOPP yang bersangkutan dengan keuntungan yang wajar
- 2) Dalam melakukan penjualan ekspor ke Indonesia, dilakukan secara langsung kepada pelanggan tanpa melalui perusahaan terafiliasi, sehingga perhitungan harga ekspor dilakukan dengan menggunakan data penjualan ekspor SRF ke Indonesia. Harga ekspor eks pabrik diperoleh dari harga CIF dikurangi *allowances* yang diajukan dan dapat diterima. KADI melakukan penyesuaian terhadap biaya bank dan *packing* yang di klaim sebagai *allowances* pada penjualan ekspor ke Indonesia karena terdapat perbedaan angka pada jawaban kuesioner dengan hasil verifikasi.
- 3) Berdasarkan hasil perhitungan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama (eks pabrik), tidak ditemukan margin dumping untuk SRF Thailand.

**G. FAKTOR *CONTINUATION* ATAU *RECURRENCE LIKELIHOOD* TERJADINYA
DUMPING DAN KERUGIAN**

48. Pada bagian ini dianalisis faktor-faktor *continuation or recurrence likelihood* yang menjadi dasar pertimbangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pengenaan
-

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

BMAD. Faktor-faktor likelihood yang dianalisis dan dilaporkan dalam Laporan Akhir ini adalah (1) apakah masih terjadi dumping (*incidence of dumping*); (2) perkembangan volume dan harga impor; (3) eksese kapasitas BOPP di Thailand dan Vietnam; (4) pengenaan *trade remedies* oleh otoritas negara lain terhadap ekspor BOPP asal Thailand dan Vietnam; dan (5) perkembangan ekspor negara yang dituduh dumping.

G.1 MASIH TERJADINYA DUMPING

49. Thailand

- a. Satu-satunya asal Thailand dalam penyelidikan Sunset Review ini adalah Perusahaan yang kooperatif dan mendapat individual margin dumping dalam pengenaan BMAD yang sedang berlangsung, sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 36/PMK.010/2019 adalah A.J. Plast Co., Ltd. Berdasarkan PMK tersebut A.J. Plast Co., Ltd., tidak dikenakan BMAD oleh karena itu perhitungan margin dumping tidak dilakukan. Namun demikian, seluruh eksportir lainnya yang tidak mendapatkan individual margin dumping, masuk dalam kategori “Perusahaan lainnya” sehingga besaran BMAD yang akan dikenakan tetap dalam besaran yang sama apabila pengenaan BMAD dilanjutkan.

50. Vietnam

- a. Sesuai dengan resital 8, tidak ada pihak yang berkepentingan dari Vietnam yang kooperatif dalam penyelidikan ini. Dengan demikian, penentuan margin dumping untuk seluruh perusahaan di Vietnam menggunakan data terbaik yang dimiliki KADI, sebagaimana diatur dalam *Article 6.8 Annex II* dan termasuk informasi yang terdapat dalam dokumen di dalam permohonan.
- b. Perhitungan nilai normal menggunakan metode konstruksi dari struktur biaya Pemohon, ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi BOPP dan profit sebesar 10%.
- c. Perhitungan harga ekspor dilakukan dengan menggunakan harga rata-rata CIF selama periode penyelidikan yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik, dikurangi biaya transportasi, *handling* dan *insurance*.

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

- d. Berdasarkan perhitungan nilai normal dan harga ekspor di atas, masih ditemukan margin dumping untuk perusahaan di Vietnam.
51. Dengan demikian, kemungkinan masih berlanjutnya dumping dan kerugian akan terjadi apabila pengenaan BMAD dihentikan.

G.2 PERKEMBANGAN VOLUME DAN HARGA IMPOR

52. Pada Tabel 10 terlihat bahwa selama periode 2019-2022, volume impor dari Thailand meningkat sebesar 95% sedangkan volume impor dari Vietnam menurun sebesar 2,2%. Namun secara kumulatif, impor kedua negara tersebut meningkat sebesar 16,4%. Impor negara lainnya juga mengalami peningkatan dengan tren sebesar 5,1% pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah dikenakan BMAD, impor BOPP Indonesia dari kedua negara yang dituduh dumping (Thailand dan Vietnam) masih terus meningkat. Peningkatan impor secara signifikan (>100% dibandingkan tahun 2020) dari kedua negara yang dituduh dumping terjadi pada 2021-2022.

Tabel 10. Perkembangan Volume Impor BOPP

						(Indeks)
No	Uraian	2019	2020	2021	2022	Tren (%)
1	Thailand	100	98	514	533	95,0
2	Vietnam	100	61	92	81	(2,2)
3	Impor Negara Dumping	100	65	137	130	16,4
4	Impor Negara Lainnya	100	100	120	111	5,1
5	Total Impor	100	92	124	115	7,5

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

53. Perkembangan pangsa pasar dalam kondisi konsumsi nasional meningkat 1,4%, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 11 dinikmati oleh produk impor. Tampak dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa pangsa pasar impor negara yang dituduh dumping meningkat dari 100 poin indeks pada tahun 2019 menjadi 103 poin indeks pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 15%. Sementara pangsa pasar IDN

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

selama 2019-2022 relatif stabil (0,1%) namun pangsa pasar idn lainnya mengalami penurunan sebesar 4%.

54. Pada Tabel 12 terlihat bahwa selama periode penyelidikan, harga pokok penjualan IDN mengalami peningkatan sebesar 3,9% dan pada periode yang sama harga IDN juga mengalami peningkatan sebesar 4,9% (Tabel 12). IDN harus menurunkan harga jual pada tahun 2022 untuk dapat mempertahankan penjualan (menghindari terjadinya peningkatan persediaan) sehubungan dengan volume impor BOPP asal Vietnam yang relatif lebih tinggi dari volume impor asal Thailand, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 10, dengan harga impor yang selalu berada di bawah harga jual IDN (price undercutting) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 12.

Tabel 11. Perkembangan Pangsa Pasar

No	Pangsa Pasar	2019	2020	2021	2022	Tren
1	Thailand	100	96	484	113	92,3
2	Vietnam	100	60	138	96	(3,6)
3	Impor Negara Dumping	100	64	194	103	14,8
4	Impor Negara Lainnya	100	98	111	100	3,6
5	Total Impor	100	90	124	101	6,0
6	IDN	100	100	89	115	(0,1)
7	idn lainnya	100	106	95	89	(3,6)
8	Total Produsen dalam negeri	100	103	93	100	(2,1)
9	Konsumsi Nasional	100	100	100	100	-
10	Konsumsi Nasional	100	102	111	102	1,4

Sumber: BPS dan IDN, diolah.

Tabel 12. Perkembangan Harga Jual BOPP

						Indeks
No	Keterangan	2019	2020	2021	2022	Tren (%)
1	HPP	100	90	108	107	3,9
2	Harga Jual IDN	100	92	114	109	4,9
tanpa BMAD						
3	Thailand	100	103	74	77	(10,7)
4	Vietnam	100	87	113	121	8,6
Price Undercutting						

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

5	Thailand	100	127	(15)	4	-
6	Vietnam	(100)	(103)	(118)	(80)	-
dengan BMAD						
7	Thailand	100	103	74	77	(10,7)
8	Vietnam	100	87	113	120	8,6
Price Undercutting						
9	Thailand	100	126	(8)	10	-
10	Vietnam	(100)	(107)	(120)	(72)	-

Sumber: IDN dan BPS, diolah.

Catatan: THC 2,5%, BMAD 3,9% untuk Vietnam dan 0% untuk Thailand

55. Lebih lanjut, dari Tabel 12 di atas terlihat bahwa selama periode penyelidikan, harga IDN meningkat sebesar 4,9% seiring dengan peningkatan HPP sebesar 3,9%. Namun demikian, dengan pengenaan maupun tanpa pengenaan BMAD, harga IDN bersaing dengan harga impor BOPP asal Thailand, sehingga pada tahun 2022 IDN sedikit menurunkan harga. Berbeda dengan harga impor BOPP asal Vietnam, IDN tidak mampu bersaing karena meskipun telah dikenakan BMAD, harga impor BOPP Vietnam selalu berada di bawah IDN selama periode penyelidikan.

Dengan terjadinya peningkatan impor dari kedua negara yang dituduh dumping pada saat pengenaan BMAD masih berlangsung menunjukkan bahwa kemungkinan masih berlanjutnya praktik dumping yang mengakibatkan berlanjutnya kerugian akan terjadi apabila pengenaan BMAD tidak dilanjutkan.

G.3 EXCESS CAPACITY BOPP DI NEGARA YANG DIKENAKAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD)

G.3.1 THAILAND

Tabel 13. Excess Capacity Thailand

Keterangan	Indeks				
	2019	2020	2021	2022	Tren (%)
Kapasitas Terpasang	100	100	148	148	16,8
Produksi	100	80	130	160	20,9
Utilisasi kapasitas	100	79	88	108	3,4
Persediaan	100	128	165	166	19,4
Excess capacity	100	156	133	78	(8,7)

Sumber: Jawaban Kuesioner. Diolah.

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM
REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD)
TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE
(BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

Berdasarkan data Tabel 13 di atas, tampak bahwa terdapat peningkatan kapasitas terpasang, produksi, utilisasi kapasitas dan persediaan di Thailand dengan tren masing-masing sebesar 16,8%, 20,9%, 3,4% dan 19,4%. Peningkatan kapasitas terpasang di Thailand sejak tahun 2021 ditengarai disebabkan oleh adanya industri baru yang memproduksi BOPP. Dengan kapasitas yang meningkat sebesar 47,5% sejak tahun 2021, terjadi peningkatan utilisasi kapasitas di Thailand dari 79 poin indeks di tahun 2020 menjadi 108 poin indeks di tahun 2022 merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan ekspor Thailand ke Indonesia sejak tahun 2021 hingga >100% meski dengan pengenaan BMAD. Selain itu, dengan peningkatan kapasitas dan utilisasi yang masih di kisaran 58%-79%, terdapat excess capacity sebesar antara 21% - 42% selama periode penyelidikan. Kondisi ini merupakan faktor likelihood yang akan berpotensi mengakibatkan berulangnya dan/atau berlanjutnya kembali dumping maupun kerugian apabila pengenaan BMAD tidak diperpanjang. Selain itu, semakin meningkatnya persediaan nasional Thailand selama periode 2019-2022 akan mendorong terjadinya peningkatan impor dumping dari Thailand apabila pengenaan BMAD dihentikan.

G.3.2 VIETNAM

56. Vietnam masih memiliki *excess capacity* sebesar 16% - 31% (Tabel 14) pada periode 2019-2022. Apabila perusahaan di Vietnam meningkatkan kapasitas produksinya ke level maksimal dan BMAD tidak lagi diberlakukan di pasar Indonesia, tekanan impor asal Vietnam akan semakin tinggi terhadap pangsa pasar IDN.

Tabel 14. *Excess Capacity* Vietnam (MT)

Keterangan	Satuan	2019	2020	2021	2022	Tren (%)
Kapasitas Terpasang	MT	148.000	148.000	148.000	148.000	-
Produksi	MT	101.648	121.000	124.000	125.000	6,7
Utilisasi kapasitas	%	69	82	84	84	6,3
<i>Excess capacity</i>	%	31	18	16	16	(19,0)

Sumber: Pemohon; Trade Map. Diolah.

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

G.4 PENGENAAN *TRADE REMEDIES* OLEH OTORITAS NEGARA LAIN TERHADAP EKSPOR NEGARA YANG DITUDUH DUMPING

57. Terdapat pengenaan BMAD dari negara lain seperti Vietnam dan Korea Selatan terhadap impor BOPP asal Thailand (Tabel 15). Kondisi ini akan mendorong perusahaan-perusahaan di Thailand mengalihkan ekspornya ke negara-negara lain, termasuk Indonesia apabila pengenaan BMAD atas impor dari Thailand dihentikan.

Tabel 15. Pengenaan *Trade Remedies* Terhadap Ekspor Negara Dituduh

Negara Yang Mengenaikan	<i>Trade Remedy</i> Yang Dikenakan	Negara Yang Dikenakan	Margin	Status
Vietnam	Antidumping	RRT, Thailand, Malaysia	RRT:14.99%-43.04% Thailand: 20.35% Malaysia: 10.91%-23.05%	Berlaku sejak 20 Juli 2020
Korea Selatan	Antidumping	RRT, Indonesia, Thailand	2.15% - 25.04% untuk ketiga negara yang dikenakan	Berlaku sejak 20 Des 2013 dan diperpanjang pada 23 Agustus 2019

Sumber: WTO, Diolah.

G.5 PERKEMBANGAN EKSPOR NEGARA DUMPING

58. Tujuan ekspor BOPP Thailand yang terutama (5 besar) adalah Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Philipina dan Indonesia (Tabel 16). Kemampuan ekspor BOPP Thailand tampak mengalami pertumbuhan dengan tren positif. Indonesia menempati urutan ke-5 tujuan ekspor Thailand. Berdasarkan jawaban kuesioner produsen BOPP Thailand, pada masa pengenaan BMAD, ekspor Thailand ke Indonesia justru mengalami peningkatan selama periode penyelidikan 2019-2022 dengan tren sebesar 84%. Peningkatan ekspor Thailand ke Indonesia disebabkan oleh adanya industri baru di Thailand yang baru memproduksi secara komersial pada bulan Juli 2021. Hal ini ditunjukkan oleh *price undercutting* (Tabel 12) yang terjadi dengan produk Thailand pada tahun 2021.

Tabel 16. Perkembangan Ekspor Thailand, MT

No	Negara	2019	2020	2021	2022	Tren (%)	Share (%)
----	--------	------	------	------	------	----------	-----------

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

1	Amerika Serikat	5.275	5.981	8.898	8.725	21,0	9,9
2	Jepang	10.536	8.562	6.693	8.591	(8,2)	9,7
3	Malaysia	2.517	2.838	4.022	7.915	46,0	9,0
4	Philipina	9.067	8.534	3.612	7.017	(15,0)	8,0
5	Indonesia	1.236	2.017	6.989	6.223	83,9	7,1
6	Vietnam	17.042	8.901	7.588	5.929	(28,3)	6,7
7	Myanmar	5.646	4.984	5.625	4.440	(5,8)	5,0
8	India	1.420	1.818	5.687	4.033	53,3	4,6
9	Bangladesh	2.195	3.047	3.337	3.042	11,3	3,4
10	Negara Lainnya	12.389	12.486	15.058	32.273	35,8	36,6
Total		67.323	67.323	59.168	67.509	9,9	100

Sumber: *Trade Map*. Diolah

59. Selanjutnya untuk Vietnam (Tabel 17), Indonesia merupakan negara tujuan ekspor yang utama (menempati urutan 2 terbesar setelah Malaysia). Ekspor Vietnam ke Indonesia selama pengenaan BMAD mengalami pertumbuhan dengan tren sebesar 4,7%. Namun demikian, produk Vietnam masih mampu bersaing dengan produk dalam negeri Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh *price undercutting* (Tabel 13) yang terjadi dengan produk Vietnam selama tahun 2019-2022.

Tabel 17. Perkembangan Ekspor Vietnam

(MT)							
No	Negara	2019	2020	2021	2022	Tren (%)	Share (%)
1	Malaysia	3.194	4.160	5.687	3.799	8,7	25,2
2	Indonesia	4.011	2.313	4.568	3.729	4,7	24,8
3	Japang	3.566	3.284	2.073	2.837	(10,8)	18,8
4	Kamboja	621	549	1.014	988	22,2	6,6
5	Korea	4.556	1.185	1.056	758	(42,3)	5,0
6	Amerika Serikat	266	394	584	632	34,8	4,2
7	Taipei	1.245	1.020	647	557	(24,9)	3,7
8	Australia	212	213	238	307	13,0	2,0
9	Thailand	3.441	1.368	731	253	(57,1)	1,7
10	Negara Lainnya	2.063	1.567	1.166	1.199	(17,5)	8,0
Total		23.175	16.055	17.763	15.059	(11)	100

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM
REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD)
TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE
(BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

Sumber: *Trade Map*. Diolah

H. FAKTOR LAIN

H.1 PERKEMBANGAN EKSPOR PEMOHON

Tabel 18. Total Ekspor Pemohon

Indeks

Keterangan	2019	2020	2021	2022	Tren (%)
Penjualan Ekspor	100	125	145	156	16
Penjualan Domestik	100	103	99	105	1
Produksi	100	110	114	126	8

Sumber: Pemohon, diolah

60. Kinerja ekspor Pemohon cenderung meningkat dari tahun 2019 - 2022. Hal ini membuktikan bahwa barang yang diproduksi oleh Pemohon telah memenuhi spesifikasi dan standar yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga barang Pemohon dapat diterima di pasar internasional dan merupakan penyebab kerugian yang dialami Pemohon.

H.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI NASIONAL

Tabel 19. Perkembangan Volume Konsumsi Nasional

Keterangan	2019	2020	2021	2022	Tren (%)
Total Konsumsi Nasional	100	102	111	102	1,4

Sumber: BPS dan data perusahaan

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM
REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD)
TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE
(BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

61. Berdasarkan tabel 19 di atas, konsumsi BOPP nasional terus meningkat pada periode penyelidikan dengan tren sebesar 1,4%. Namun demikian peningkatan konsumsi ini tidak dapat dinikmati oleh IDN karena impor dumping yang meskipun telah dikenakan BMAD terus membanjiri pasar Indonesia.

H.3 TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

62. IDN menggunakan teknologi *stenter process* dalam memproduksi BOPP karena teknologi adalah komponen terpenting dalam memaksimalkan kinerja perusahaan. IDN terus meningkatkan standar teknologi yang digunakan sesuai dengan kemajuan terkini dan terus melakukan studi secara berkala untuk mendapatkan teknologi yang paling efisien. Pada akhir tahun 2021 IDN juga memperbarui mesin mereka dengan teknologi terbaru dari Jerman. Berdasarkan hasil penyelidikan, teknologi yang digunakan oleh IDN tidak berbeda dengan yang digunakan oleh salah satu perusahaan Thailand yang diverifikasi, sehingga teknologi bukanlah penyebab kerugian yang dialami IDN.

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM
REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD)
TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE
(BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

I. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DAN RESPON KADI

KADI menerima sejumlah tanggapan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

- (1) Industri Dalam Negeri (IDN);
- (2) Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI); dan
- (3) SRF Industries (Thailand) Ltd (SRF)

(1) Industri Dalam Negeri (IDN)

Terkait dengan perhitungan margin dumping untuk SRF Thailand, bersama ini kami ingin menyampaikan bahwa harga domestik di Thailand tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentuan nilai normal karena terdapat distorsi pasar di Thailand yang disebabkan oleh adanya Particular Market Situation (PMS) di Thailand, dimana pasar di Thailand tersebut dipengaruhi oleh situasi tertentu baik disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah atau pihak-pihak yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah (berdasarkan mandat atau delegasi dari pemerintah), yang menyebabkan harga dalam negeri tidak dapat digunakan sebagai proper comparison. Hal ini juga sudah diatur dalam *Anti-Dumping Agreement* dalam Article 2.2 terkait *Particular Market Situation*, yang berbunyi:

“When there are no sales of the like product in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or when, because of the particular market situation or the low volume of the sales in the domestic market of the exporting country, such sales do not permit a proper comparison, the margin of dumping shall be determined by comparison with a comparable price of the like product when exported to an appropriate third country, provided that this price is representative, or with the cost of production in the country of origin plus a reasonable amount for administrative, selling and general costs and for profits. (catatan kaki disembunyikan)”

Identifikasi adanya PMS dilakukan ketika terdapat situasi pasar tertentu yang bersifat berbeda, spesifik, dan/atau individual di negara pengekspor yang menyebabkan penjualan dalam negeri tidak memungkinkan adanya *fair comparison* dengan penjualan ekspor, sehingga penjualan dalam negeri tidak dapat menjadi dasar perhitungan nilai normal. Hal ini juga ditegaskan oleh Panel dalam kasus *Australia – Anti-Dumping Measures on Paper* yang menyatakan bahwa:

“..we agree with the observation of the GATT panel in EEC – Cotton Yarn that a "particular market situation" is only relevant insofar as it has the effect of

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM
REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD)
TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE
(BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

rendering domestic sales unfit to permit a proper comparison. The phrase "particular market situation" does not lend itself to a definition that foresees all the varied situations that an investigating authority may encounter that would fail to permit a "proper comparison" (Australia – Anti-Dumping Measures on Paper, para. 7.21)

Selanjutnya, dalam kasus yang sama Panel juga menegaskan bahwa situasi yang disebabkan karena adanya government action tidak serta-merta dapat didiskualifikasi dari pengertian “particular market situation” karena adanya ketentuan Article 32.1 SCM Agreement. Berikut adalah temuan Panel terkait hal ini:

“an anti-dumping measure taken in accordance with the Anti-Dumping Agreement and Article VI of the GATT 1994 would not be precluded by the operation of Article 32.1 of the SCM Agreement.... . We are not persuaded, therefore, by Indonesia's argument that Article 32.1 of the SCM Agreement supports interpreting the term "particular market situation" to exclude situations that arise from circumstances that include government action that could be characterized as a subsidy if it were examined under the SCM Agreement” (Ibid., para. 7.50)

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, contoh keadaan yang dapat diidentifikasi sebagai PMS adalah situasi dimana adanya kebijakan/tindakan pemerintah maupun pihak yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang mengakibatkan harga dalam negeri tidak layak digunakan sebagai *proper comparison* dalam perhitungan dumping margin. Berdasarkan data – data yang dimiliki oleh IDN, berikut ini adalah contoh program – program yang diterapkan oleh pemerintah Thailand yang terindikasi mempengaruhi harga domestiknya:

a) *Investment Promotion Act Section 317*

Berdasarkan Section 31 IPA, perusahaan yang dipromosikan dapat diberikan pembebasan dari pajak penghasilan perusahaan karena laba bersih yang diperoleh dari proyek investasi yang disetujui BOI (*Thailand Board of Investment*) untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga belas tahun (tergantung pada lokasi kegiatan yang dipromosikan, atau statusnya) sebagai "kegiatan prioritas" atau "kegiatan yang sangat penting dan bermanfaat bagi negara). 8 Jumlah pajak yang dikecualikan berdasarkan Section 31 IPA dihitung dengan menerapkan tarif pajak penghasilan perusahaan sebesar 25 persen, untuk laba hingga 300 juta THB, dan 30 persen untuk laba yang melebihi 300 juta THB.

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM
REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD)
TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE
(BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

Program ini telah ditetapkan sebagai countervailable program dalam kasus lain seperti *US – Certain Frozen Warmwater*. Selain itu dalam kasus *US – Certain Frozen Warmwater Shrimp from Thailand*, USDOC juga menemukan bahwa kinerja ekspor (*export performance*) merupakan salah satu persyaratan yang dipertimbangkan oleh BOI untuk memberikan status promosi kepada Pemohon dalam program IPA. Oleh karena itu, setiap program dalam IPA dapat dikategorikan sebagai subsidi ekspor.

b) *Investment Promotion Act Section 3010*

Program ini memberikan pengurangan bea masuk atas bahan baku dan bahan essential yang dikonsumsi dalam produksi dan telah ditetapkan sebagai countervailable program dalam kasus lain yaitu *US – Hot Rolled Steel*.

c) *Investment Promotion Act Section 35(1)*

Program ini memberikan dasar hukum untuk pengurangan lima puluh persen dari tarif normal pajak penghasilan orang atas laba bersih yang diperoleh dari kegiatan yang dipromosikan untuk jangka waktu tidak lebih dari lima tahun sejak tanggal kedaluwarsa yang mengacu pada Section 31 dari IPA atau dari tanggal pendapatan pertama yang diperoleh dari kegiatan yang dipromosikan. Untuk mendapatkan manfaat dari program ini, perusahaan harus memiliki *Certificate of Promotion*, yang menetapkan bahwa ia berhak atas pengurangan 50% dalam tarif pajak normal atas laba bersih yang diperoleh dari operasi tertentu untuk jangka waktu 5 tahun.

d) *Investment Promotion Act Section 35(2)*

Program ini memberikan dasar hukum untuk pengurangan dua kali lipat untuk perhitungan pendapatan kena pajak dari biaya transportasi, listrik, dan biaya air selama 10 tahun sejak tanggal pendapatan pertama yang diperoleh dari kegiatan yang dipromosikan. Untuk mendapatkan manfaat dari program ini, perusahaan harus memiliki Sertifikat Promosi yang menetapkan bahwa perusahaan tersebut berhak atas pengurangan dua kali lipat dari pendapatan kena pajak untuk transportasi, listrik, dan biaya air sesuai dengan Pasal 35 (2) IPA. Selain pengurangan biasa dari biaya yang disebutkan di atas, perusahaan yang dipromosikan BOI diizinkan untuk mengurangi jumlah yang sama untuk kedua kalinya dari keuntungan mereka pada sertifikat tax return. Perusahaan harus

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

mengisi kolom khusus dalam SPT tahunan yang ditujukan untuk kegiatan yang dipromosikan. Akibatnya laba bersih kena pajak dikurangi dengan jumlah ini; atau kerugian bersih meningkat dengan jumlah ini. Program ini telah ditentukan sebagai *counteravaible* program kasus lain seperti *EUTerephthalic Acid*.

e) *Investment Promotion Act Section 35(3)*

Di bawah program ini, perusahaan-perusahaan yang dipromosikan diizinkan untuk mengurangi laba bersih, selain dari depresiasi normal, jumlah yang tidak melebihi 25% dari biaya pemasangan proyek atau pembangunan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan yang dipromosikan selama 10 tahun sejak tanggal pendapatan pertama yang diperoleh dari kegiatan yang dipromosikan.

f) *Investment Promotion Act Section 36(1)*

Di bawah program ini, BOI diberi wewenang untuk memberikan pembebasan bea masuk atas bahan baku dan bahan-bahan penting yang digunakan dalam produksi barang untuk ekspor. Lebih lanjut, program ini telah ditentukan sebagai *counteravaible program* dalam kasus lain seperti *US-Hot Rolled Steel*.

g) *Investment Promotion Act 28 Exemption from Payment of Import Duties on Machinery* (Pembebasan pembayaran biaya impor untuk peralatan pabrik)

Berdasarkan Section 28 IPA, perusahaan yang memegang sertifikat promosi dari BOI dapat mengajukan klaim untuk pembebasan bea masuk yang berlaku untuk impor mesin jika: (1) mesin yang diimpor tersebut tidak dapat didapatkan di dalam negeri; (2) mesin tersebut sesuai dengan jenis dan fungsi mesin yang diuraikan dalam sertifikat kelayakan BOI (*BOI's eligibility certificate*) perusahaan pemohon, atau dalam daftar mesin yang dimodifikasi yang disediakan dan disetujui oleh BOI; dan (3) mesin harus digunakan hanya untuk proyek yang dipromosikan. Program ini sudah diputuskan sebagai *counteravaible program* dalam kasus-kasus terdahulu yang dilakukan oleh penyeldikan negara lain seperti *US – Citric Acid and Certain Salts*, *US – Certain Frozen Warmwater Shrimp*, *US-Hot Rolled Carbon Steel Flat Products* and *EU – Purified Terephthalic Acid*.

h) *Provision of Electricity for Less Than Adequate Remuneration (LTAR)*¹⁸

Struktur pasar listrik di Thailand menggunakan model pembeli tunggal yang disempurnakan (*enhanced single buyer model*). Secara khusus, struktur pasar

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM
REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD)
TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE
(BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

listrik Thailand terdiri dari kategori berikut: (1) generator listrik, (2) Otoritas Pembangkit Listrik Thailand (EGAT), pembeli grosir tunggal dan pemancar listrik yang juga menghasilkan sebagian listrik di Thailand, (3) Otoritas Listrik Metropolitan (MEA) dan PEA, yang merupakan distributor dan pengecer, dan (4) konsumen (yaitu, pengguna akhir). MEA, sebuah perusahaan milik negara yang memasok dan mendistribusikan listrik di Bangkok, dan dua provinsi yang berdekatan, yaitu Nonthaburi dan Samutprakam. PEA, juga sebuah perusahaan milik negara yang memasok dan mendistribusikan listrik di seluruh provinsi di Thailand. Di kasus *Hot-Rolled dari Thailand*, USDOC menemukan bahwa ketentuan RTG terkait tarif listrik merupakan *countervailable* subsidi karena RTG menyediakan listrik melalui tiga otoritas: EGAT, MEA, dan PEA secara LTAR. USDOC juga menemukan bahwa penyediaan listrik untuk responden dalam kasus ini yaitu pelanggan PEA, adalah bersifat spesifik sesuai dengan *section 771 (5A) (D) (iv) Tariff Act 1930* karena "terbatas pada pengguna yang berlokasi di wilayah geografis yang ditentukan di Thailand (yaitu, pelanggan di luar wilayah metropolitan Bangkok)."

i) *Tax Coupon For Exported Goods*

Kementrian Keuangan dan Departemen Bea Cukai Thailand mengatur sistem kupon pajak untuk eksportir, berdasarkan amanat the 1981 Tax and Duty Compensation of Exported Good Produced in the Kingdom Act B.E. (2524).²¹ Dalam kasus US – Certain Frozen Warmwater Shrimp, RTG menyatakan bahwa produsen Thailand yang memproduksi barang lokal yang memenuhi syarat dapat mengajukan kupon pajak atas ekspor barang yang mereka produksi. Nilai kupon pajak dihitung dengan mengalikan tariff kupon produk dengan nilai FOB dari barang ekspor perusahaan. Dalam laporan tersebut, juga dinyatakan bahwa sistem kupon pajak mengembalikan bea masuk yang dibayarkan untuk bahan baku dan input lain yang digunakan dalam produksi barang ekspor. Perusahaan pengekspor kemudian dapat menggunakan kupon pajak ini sebagai kredit terhadap pajak penghasilan perusahaan. Namun, dengan pengecualian daftar barang-barang ekspor yang diidentifikasi secara khusus oleh Departemen Pabean, akan tetapi semua barang yang diekspor dari Thailand memenuhi syarat untuk sistem kupon pajak.

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

Lebih lanjut, dalam kasus *US-Rubber Bands*, RTG menjelaskan bahwa sistem kupon pajak mengembalikan bea masuk dan pajak tidak langsung yang dibayarkan untuk bahan baku dan input lainnya yang digunakan dalam produksi barang ekspor. Untuk mendapatkan manfaat dari program ini, RTG menyatakan bahwa eksportir harus menyerahkan formulir aplikasi standar bersama dengan dokumen pendukung dalam waktu satu tahun sejak tanggal ekspor. Kupon ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal penerbitan, dan validitasnya dapat diperpanjang tiga tahun sekaligus, dengan tidak lebih dari total dua kali perpanjangan yang diizinkan. Perusahaan ekspor juga dapat menggunakan kupon pajak sebagai kredit terhadap pajak penghasilan perusahaan.

Program ini telah ditetapkan sebagai *countervailable* program di berbagai kasus lain seperti *US – Certain Warmwater Shrimp* dan *US - Rubber Bands*.

Dalam penyelidikan antidumping dari negara – negara anggota WTO lain terhadap Indonesia, adanya tuduhan atas beberapa program atau kebijakan/tindakan yang diberikan oleh pemerintah untuk industri - industri tertentu yang menyebabkan Indonesia dianggap sebagai negara dengan *Particular Market Situation*. Akibatnya, perhitungan nilai normal untuk produk terkait mengesampingkan harga actual domestik di Indonesia karena dianggap telah terdistorsi dan tidak layak digunakan sebagai dasar perhitungan dumping margin. Contoh kasus ini dapat dilihat diantaranya dalam penetapan BMAD dari Australia atas A4 Copy Paper dari Indonesia, yaitu *Commission* menetapkan adanya *Particular Market Situation* di Indonesia dan menyimpulkan harga domestik untuk produk A4 paper di Indonesia tidak dapat digunakan dalam perhitungan nilai normal karena adanya intervensi dari pemerintah dalam bentuk program-program yang sebelumnya dituduhkan sebagai program subsidi. *Commission* berpandangan bahwa program Pemri telah meningkatkan ketersediaan kayu, sehingga secara artifisial menurunkan harga *logs* dan *pulp* di Indonesia. *Commission* menganggap bahwa tanpa adanya intervensi Pemri, maka harga untuk *logs* dan *pulp* akan berada di atas harga yang berlaku selama periode penyelidikan dan bahwa biaya input yang lebih tinggi ini akan tercermin dalam harga domestik yang lebih tinggi untuk *A4 copy paper*. Oleh sebab

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM
REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD)
TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE
(BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

itu, dalam penyelidikan Commission menggunakan metode konstruksi dalam menghitung nilai normal.

Selain penyelidikan anti-dumping A4 copy paper dari Australia, terdapat penyelidikan lain dari Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menggunakan Particular Market Situation sebagai dasar penyidik dalam menghitung dumping margin yaitu: (i) penetapan BMAD dari Amerika Serikat atas biodiesel dari Indonesia, (ii) dan penetapan BMAD dari Uni Eropa atas cold-rolled stainless steel dari Indonesia.

(2) Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI)

..... bahwa harga domestik di Thailand tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentuan nilai normal karena terdapat distorsi pasar di Thailand yang disebabkan oleh adanya *Particular Market Situation* (PMS) di Thailand, dimana pasar di Thailand tersebut dipengaruhi oleh situasi tertentu baik disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah atau pihak-pihak yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah (berdasarkan mandat atau delegasi dari pemerintah), yang menyebabkan harga dalam negeri tidak dapat digunakan sebagai *proper comparison*. Hal ini juga sudah diatur dalam *Antidumping Agreement* dalam Article 2.2 terkait *Particular Market Situation*, yang berbunyi:

“When there are no sales of the like product in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or when, because of the particular market situation or the low volume of the sales in the domestic market of the exporting country, such sales do not permit a proper comparison, the margin of dumping shall be determined by comparison with a comparable price of the like product when exported to an appropriate third country, provided that this price is representative, or with the cost of production in the country of origin plus a reasonable amount for administrative, selling and general costs and for profits.”

Identifikasi adanya PMS dilakukan ketika terdapat situasi pasar tertentu yang bersifat berbeda, spesifik, dan/atau individual di negara pengekspor yang menyebabkan penjualan dalam negeri tidak memungkinkan adanya fair comparison dengan penjualan ekspor, sehingga penjualan dalam negeri tidak dapat menjadi dasar perhitungan nilai normal.

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM
REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD)
TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE
(BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

(3) Eksportir – SRF Industries (Thailand) Ltd (SRF)

Bahwa, sebagaimana telah disampaikan oleh ABOFI (kami luruskan dalam hal ini) di dalam tanggapannya dengan mengacu pada Kasus DS 529 (Australia – A4 Copy Paper) (rasionalitas panel dan pendapat panel pada kasus EEC-Cotton Yarn) bahwa konstruksi nilai normal sehubungan dengan Pasal 2.2 *Agreement* hanya bisa dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa: (1) Adanya Particular Market Situation (“PMS”); dan (2) PMS tersebut menyebabkan tidak dapat dilakukannya proper comparison antara harga jual domestik dan harga ekspor karena adanya distorsi pada pasar domestik.

Bahwa faktanya tidak terdapat PMS sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2.2 *Agreement*. Di dalam tanggapannya ABOFI secara keliru dan berlebihan menyatakan bahwa program Pemerintah Thailand berikut ini adalah *countervailable subsidy* yang menyebabkan PMS:

- b. *Investment Promotion Act Section 31*;
- c. *Investment Promotion Act Section 30*;
- d. *Investment Promotion Act Section 35 (1)*;
- e. *Investment Promotion Act Section 35 (2)*;
- f. *Investment Promotion Act Section 35 (3)*;
- g. *Investment Promotion Act Section 36 (1)*;
- h. *Investment Promotion Act 28 Exemption from Payment of Import Duties on Machinery*;
- i. *Provision of Electricity for Less Than Adequate Remuneration (LTAR)*; dan
- j. *Tax Coupon For Exported Goods*.

Usulan dari ABOFI atas adanya PMS untuk produk BOPP berdasarkan fakta-fakta yang keliru, dibuat-buat dan menyesatkan karena: (1) Tidak ada satu pun kasus yang dirujuk oleh ABOFI dalam kaitannya dengan program-program tersebut terkait dengan BOPP; (2) Tidak terdapat bukti bahwa terdapat penyelidikan anti-dumping atas produsen BOPP Thailand oleh yurisdiksi mana pun dengan melakukan konstruksi nilai normal dikarenakan adanya PMS sebagaimana dimaksud Pasal 2.2 *Agreement*; (3) Kesemua program-program tersebut adalah program investasi umum dan diterapkan secara global termasuk Indonesia dan tidak ada konstruksi nilai normal berdasarkan PMS Pasal 2.2 *Agreement* atas Indonesia dikarenakan oleh

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

program-program tersebut (termasuk fasilitas Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM"), Kawasan Berikat (Bonded Zone), dan Kemudahan Import Tujuan Ekspor ("KITE")) karena tidak memenuhi kriteria PMS Pasal 2.2 *Agreement*; (4) Tidak terdapat relevansi absolut antara subsidi dengan PMS karena di dalam penyelidikan anti-subsidi pada Kasus Australia - A-4 Copy Paper, Australia menyatakan larangan ekspor log bukan subsidi tapi menggunakannya sebagai faktor terbentuknya PMS berdasarkan Pasal 2.2 *Agreement*; (5) tidak terdapat bukti bahwa kesemua program-program tersebut mendistorsi pasar domestik BOPP di Thailand; bahwasannya situasi PMS harus mencerminkan satu kebijakan yang memberikan dampak distorsif secara sangat signifikan hanya pada pasar domestik yang sama sekali tidak relevan dengan program-program yang disampaikan oleh ABOFI dalam tanggapannya sebagaimana kami sampaikan di atas.

Terlebih dari keseluruhan program-program tersebut hanya beberapa yang diikuti oleh SRF dan telah disampaikan serta diverifikasi oleh KADI, yang mana beberapa program itu merupakan fasilitas investasi umum selayaknya dilakukan oleh Indonesia melalui BKPM atau *bonded zone* serta *free trade zone* maupun KITE. Karenanya, program dimana SRF ikut serta tersebut tidak mungkin menyebabkan distorsi pasar domestik di Thailand.

Bahwa terlebih adanya PMS tidak serta merta dapat membenarkan otoritas untuk melakukan konstruksi nilai normal karena Pasal 2.2 *Agreement* menyaratkan PMS harus menyebabkan tidak dapat dilakukannya perbandingan yang layak (*proper comparison*) antara harga domestik dan harga ekspor dari produsen, hal mana sama sekali tidak terjadi pada SRF dan terlebih bahwa PMS sebagaimana dimaksudkan oleh ABOFI tidak terjadi pada pasar domestik BOPP di Thailand.

Bahwa berdasarkan, fakta-fakta di atas, usulan yang tidak berdasar dari ABOFI selayaknya ditolak dan kami memohon perhitungan dumping KADI atas SRF tetap dilakukan berdasarkan prinsip dasar *Agreement* yang sudah benar dengan mengacu pada data-data yang disampaikan oleh SRF kepada KADI sebagaimana telah diverifikasi secara detail dan menyeluruh.

Bahwa perlu kami sampaikan di alam DS 529, Panel telah dengan tegas menyatakan Australia melanggar diantaranya Pasal 2.2 *Agreement* karena

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

melakukan konstruksi nilai normal secara tidak berdasar dan lebih lanjut bahwa konstruksi tersebut tidak dibenarkan menurut Pasal 2.2.1.1 Agreement karena tidak memakai data aktual dari produsen Kertas A4 Copy Paper Indonesia walaupun terdapat PMS, hal mana sama sekali tidak terjadi pada pasar/industri BOPP di Thailand.

Tanggapan KADI terhadap isu *Particular Market Situation (PMS)*:

IDN dan ABOFI menyampaikan tanggapan terhadap Laporan Data Utama KADI mengenai isu PMS. Penyelidikan *interim review* dilakukan bersamaan dengan dimulainya penyelidikan *sunset review* pada tanggal 29 Maret 2023. Pemberitahuan dimulainya penyelidikan telah disampaikan kepada pihak yang berkepentingan yang diketahui dalam permohonan dan dimuat dalam harian berskala nasional. Sejak dimulainya penyelidikan, hingga KADI menerbitkan laporan data utama tidak ada tanggapan terhadap penyelidikan *sunset review* maupun *interim review*. Tanggapan IDN mengenai (PMS) di Thailand, baru disampaikan setelah KADI menyampaikan laporan data utama kepada pihak yang berkepentingan yang memuat temuan marjin dumping terhadap SRF, dimana KADI telah memeriksa jawaban kuesioner, melakukan verifikasi di tempat dan tidak menemukan adanya marjin dumping terhadap SRF. Informasi mengenai terjadinya PMS di Thailand semestinya disampaikan sesegera mungkin sejak dimulainya penyelidikan agar KADI sejak awal dapat memeriksa kebenaran tuduhan adanya kondisi PMS tersebut. Memperhatikan PP No. 34 Tahun 2011 mengatur bahwa durasi penyelidikan untuk peninjauan kembali adalah 12 bulan, dan mengingat batas waktu penyeldiikan yang segera berakhir, KADI tidak dapat mempertimbangkan bukti-bukti IDN dan ABOFI yang disampaikan saat diakhir penyelidikan ini. Selain itu, bukti-bukti yang disampaikan adalah program subsidi yang diberikan pemerintah Thailand, sehingga KADI akan menindaklanjuti bukti-bukti tersebut dengan melakukan penyelidikan anti subsidi.

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

I.2 Tanggapan Terhadap Perbedaan Antara Penyelidikan *New Shipper Review* dan *Interim Review*

(1) Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI)

63. Penyelidikan *interim review* dan *new shipper review* adalah dua penyelidikan yang berbeda baik dari substansi, pendekatan yang digunakan, objektivitas dan circumstances yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan WTO *Antidumping Agreement*, terdapat beberapa jenis review yang dapat dilakukan oleh penyelidik dalam kerangka setelah adanya pengenaan BMAD atas produk impor yang berasal dari negara yang dikenakan, yaitu: (i) *sunset review*; (ii) *interim review*; dan (iii) *new shipper review*.

Setiap jenis *review* tersebut memiliki objektivitas dan persyaratan yang berbeda-beda berdasarkan ketentuan yang mengatur setiap *review* tersebut dalam ketentuan WTO *Antidumping Agreement*. Oleh sebab itu, negara anggota WTO juga turut mengadopsi jenis-jenis review ini dalam ketentuan peraturan nasional mereka dalam kerangka menanggulangi situasi dan kondisi tertentu sesuai dengan masing-masing objektivitas yang ada, seperti negara Uni Eropa, Australia dan Amerika Serikat sebagai negara anggota WTO yang aktif dalam menerapkan BMAD. Ketentuan mengenai *sunset review*, *interim review* dan *new shipper review* diatur dengan dasar hukum yang berbeda – beda dalam WTO *Antidumping Agreement*. Dasar hukum untuk penyelidikan *sunset review* diatur dalam *Article 11.3 WTO Anti-Dumping Agreement* yang berbunyi:

“...any definitive anti-dumping duty shall be terminated on a date not later than five years from its imposition ... unless the authorities determine, in a review initiated before that date on their own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to that date, that the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The duty may remain in force pending the outcome of such a review.”

Selanjutnya untuk *interim review* diatur dalam *Article 11.2 WTO Antidumping Agreement* yang berbunyi:

“The authorities shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on their own initiative or, provided that a reasonable period of time has

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for a review. Interested parties shall have the right to request the authorities to examine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. If, as a result of the review under this paragraph, the authorities determine that the antidumping duty is no longer warranted, it shall be terminated immediately."

Sedangkan, *new shipper review* diatur dalam *Article 9.5 WTO Anti-Dumping Agreement* yang berbunyi:

"If a product is subject to anti-dumping duties in an importing Member, the authorities shall promptly carry out a review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to the importing Member during the period of investigation, provided that these exporters or producers can show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product. Such a review shall be initiated and carried out on an accelerated basis, compared to normal duty assessment and review proceedings in the importing Member. No antidumping duties shall be levied on imports from such exporters or producers while the review is being carried out. The authorities may, however, withhold appraisement and/or request guarantees to ensure that, should such a review result in a determination of dumping in respect of such producers or exporters, anti-dumping duties can be levied retroactively to the date of the initiation of the review."

Berdasarkan ketentuan *Article WTO Antidumping Agreement* tersebut, maka dapat dilihat secara jelas perbedaan objektivitas dari masing-masing jenis review dalam *Antidumping Agreement*, terutama antara *interim review* dan *new shipper review* yang menjadi subjek isu dalam penyelidikan interim BOPP yang dilakukan oleh KADI.

Permohonan *interim review* yang dilakukan oleh eksportir dan/atau eksportir produsen yang tidak melakukan ekspor Barang Dumping sebelum pengenaan

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

BMAD dan tidak berafiliasi dengan eksportir dan/atau eksportir produsen yang dikenakan BMAD sesuai dengan Pasal 31 ayat (1)(b) PP 34/2011 tidak bisa merubah besaran pengenaan BMAD karena secara eksplisit kondisi ini hanya bisa dilakukan berdasarkan permohonan *interim review* dari eksportir, eksportir produsen, importir, pemohon atau Industri Dalam Negeri yang kooperatif dalam penyelidikan sesuai Pasal 33 ayat (4)(c) PP 34/2011.

(2) SRF Industries (Thailand) Ltd (SRF)

64. Bahwa sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam tanggapan ABOFI bahwa *interim review* yang pada intinya diatur dalam Pasal 11.2 *Agreement* berbeda dengan *new shipper review* menurut ketentuan Pasal 9.5 *Agreement*.

Faktanya, sebagaimana disampaikan oleh SRF di dalam permohonannya bahwa permohonan tersebut adalah *new shipper review* berdasarkan Pasal 9.5 *Agreement*.

Bahwa Pasal 9.5 *Agreement* menyatakan:

"If a product is subject to anti-dumping duties in an importing Member, the authorities shall promptly carry out a review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to the importing Member during the period of investigation, provided that these exporters or producers can show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti dumping duties on the product."

Selanjutnya dengan sangat tegas bahwa ketentuan Pasal 9.5 *Agreement* tersebut merujuk pada *new shipper review* dan telah diadopsi secara memadai dalam Pasal 31 ayat (1) butir b. yang secara keseluruhan menyatakan sebagai berikut:

"(1) Pengenaan Bea Masuk Antidumping dapat ditinjau kembali berdasarkan:

- a. permohonan dari eksportir, eksportir produsen, pemohon atau Industri Dalam Negeri, dan/atau importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang kooperatif dalam proses penyelidikan;*
- b. permohonan dari eksportir dan/atau eksportir produsen yang tidak melakukan ekspor Barang Dumping sebelum pengenaan Bea Masuk Antidumping dan tidak berafiliasi dengan eksportir dan/atau eksportir produsen yang dikenakan Bea Masuk Antidumping; dan/atau*

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

c. inisiatif KADI."

Bahwa sangat jelas Pasal 9.5 *Agreement* tersebut di atas diadopsi pada Pasal 31 ayat (2) butir b dalam PP 34/2011 dan faktanya permohonan yang diajukan oleh SRF kepada KADI adalah berdasarkan Pasal 9.5 *Agreement* atau sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) butir a PP 34/2011 yang secara esensi merupakan permohonan yang dilakukan oleh eksportir produsen yang (1) yang tidak melakukan ekspor di dalam penyelidikan awal (tepatnya pada POI penyelidikan awal) serta (2) tidak terafiliasi dengan eksportir dan atau eksportir produsen yang melakukan ekspor atas produk yang diselidiki pada penyelidikan awal.

Karenanya tidak terbantahkan, terlepas dari istilah yang digunakan permohonan yang diajukan oleh SRF kepada KADI sebagaimana diterima oleh KADI adalah *new shipper review* karena fakta membuktikan bahwa (1) Permohonan SRF kepada KADI didasarkan pada Pasal 9.5 *Agreement* (Juncto Pasal 31 (1) b PP 34/2011); (2) SRF tidak melakukan ekspor BOPP ke Indonesia pada POI penyelidikan awal; (3) Terdapat ekspor BOPP oleh SRF dalam besaran *commercial quantity* yang memadai; (4) SRF tidak terafiliasi dengan eksportir dan/atau eksportir produsen yang melakukan ekspor BOPP pada POI penyelidikan awal.

Bahwa, ABOFI telah keliru dan secara tendensius menafsikan Pasal 31 PP 34/2011 untuk menyesatkan KADI. Jelas, bahwa konstruksi dalam Pasal 31 PP 34/2011 membedakan makna Pasal 31 ayat (1) butir a dan butir b. Butir a dan b Pasal 31 PP 34/2011 merupakan ketentuan yang bersifat alternatif (bukan akumulatif).

Butir a pada Pasal 31 ayat (1) PP 34/2011 diberlakukan untuk interim review yang diajukan oleh (1) pemohon yang melakukan ekspor pada POI penyelidikan awal dan (2) kooperatif dalam penyelidikan KADI. Sebaliknya, butir b pada Pasal 31 ayat (1) diberlakukan kepada pemohon yang (1) tidak terafiliasi dengan eksportir dan atau eksportir produsen yang diselidiki pada penyelidikan awal dan (2) tidak melakukan ekspor barang yang diselidiki ke Indonesia pada penyelidikan awal.

Dengan demikian, sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Pasal 31 ayat (1) butir b berlaku untuk permohonan *new shipper review* SRF yang tidak mensyaratkan adanya unsur kooperatif pada penyelidikan awal sebagaimana disyaratkan hanya

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM
REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD)
TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE
(BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

untuk pemohon yang masuk dalam kategori butir a pada Pasal 31 ayat (1) PP 34/2011. Disamping itu, tidak mungkin SRF dapat berpartisipasi dalam penyelidikan awal KADI karena SRF belum beroperasi, karenanya permohonan SRF secara jelas merujuk pada permohonan *new shipper review* berdasarkan ketentuan Pasal 9.5 *Agreement* dan Pasal 31 (1) b PP 34/2011.

Selanjutnya di dalam tanggapannya ABOFI merujuk pada ketentuan anti-dumping Amerika Serikat tentang persyaratan bona fide atas permohonan *new shipper review*.

Secara pasti Indonesia tidak terikat dengan ketentuan anti-dumping Amerika Serikat karena mempunyai prinsip kedaulatan tersendiri. Namun faktanya, permohonan *new shipper review* yang diajukan oleh SRF dan diterima KADI adalah sah dan legitimate berdasarkan ketentuan *Agreement* dan PP 34/2011 sebagaimana kami jelaskan di atas.

Terlebih, SRF di dalam permohonannya telah membuktikan bonafiditas dan terlebih penting keabsahan permohonannya kepada KADI dengan mempertimbangkan data dan informasi yang disyaratkan oleh PP 34/2011 dan KADI di dalam (1) permohonannya dan (2) selama proses review.

Di dalam permohonannya SRF telah menyampaikan bukti bahwa (1) SRF tidak melakukan ekspor BOPP ke Indonesia selama POI penyelidikan awal ;(2) SRF tidak terafiliasi dengan eksportir dan atau eksportir produsen yang melakukan ekspor BOPP ke Indonesia di dalam POI penyelidikan awal; (3) SRF melakukan ekspor BOPP ke Indonesia setelah pengenaan bea masuk anti-dumping dalam kuantitas secara komersial signifikan; (4) SRF adalah produsen BOPP; (5) telah dilakukan penelitian sangat menyeluruh oleh KADI atas permohonan SRF dan dilakukan pengisian kuesioner sesuai standar KADI yang juga detail dan komprehensif berikut dengan pertanyaan-pertanyaan tambahan; dan (6) Atas pengisian dan penyampaian kuesioner oleh SRF kepada KADI telah dilakukan verifikasi lapangan oleh tim KADI secara detail dan sangat komprehensif di lokasi SRF.

Seyogyanya tidak terdapat syarat untuk melakukan kajian kemungkinan berulangnya kerugian atau dumping dalam Pasal 9.5 *Agreement* berbeda dengan Pasal 11

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

Agreement. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 9.5 *Agreement* tidak ada keharusan bagi KADI untuk melakukan penilaian terhadap faktor terulangnya injury dan dumping atas *new shipper review/interim review* SRF. Secara lebih spesifik menurut ketentuan Pasal 9.5 *Agreement*, apabila permohonan *new shipper review/interim review* diterima, margin dumping (dumping margin) yang ditemukan KADI secara otomatis perlu diterapkan kepada pemohon.

Terlebih lanjut, kami berpendapat bahwa pengertian pada Pasal 9.5 *Agreement* didasarkan pada landasan yang rasional dan tepat karena SRF bukanlah merupakan pelaku pasar dalam penyelidikan awal BOPP KADI karena bahkan belum beroperasi pada saat tersebut dan sama sekali tidak terkait dengan perilaku dari eksportir produsen lain di Thailand pada saat penyelidikan awal.

Karenanya, *new shipper review* SRF tidak terkait dengan syarat pada Pasal 11 *Agreement* dan pada faktanya *new shipper* Pasal 9.5 *Agreement* dipisahkan secara tegas dengan reviews yang dikenal dalam Pasal 11 *Agreement*.

Terlebih penting SRF tidak dapat menyebabkan terulang kembalinya kerugian atau dumping karena SRF terbukti tidak melakukan praktek dumping dan selanjutnya KADI berhak untuk melakukan *interim review* setiap tahun untuk mengkaji kembali margin dumping SRF sebagian dasar bagi KADI untuk melakukan pengendalian dilakukan penjualan secara fair atas produk BOPP SRF ke Indonesia.

Tanggapan KADI terhadap isu Interim Review

KADI sependapat dengan ABOFI bahwa penyelidikan *interim review* dan *new shipper review* adalah dua penyelidikan yang berbeda. Namun perlu diingat bahwa meskipun PP 34 Tahun 2011 tidak menyebutkan istilah *new shipper review* namun hak eksportir produsen baru untuk mendapatkan individual margin dumping sebagaimana diatur dalam article 9.5 ADA tetap diatur dalam Pasal 31 Ayat (10) huruf b PP 34 Tahun 2011. Berkenaan dengan itu, KADI memulai penyelidikan *interim review* terhadap permohonan SRF yang belum memproduksi BOPP saat penyelidikan awal. Kemudian merujuk kepada Pasal 32 ayat (1) huruf b, dimana diatur bahwa eksportir produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) b, dapat mengajukan *interim review* untuk tidak dikenakan BMAD, sebagaimana dimohonkan oleh SRF. Sedangkan rujukan ABOFI yang mengacu pada Pasal 33

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

ayat (4) huruf c, adalah tidak tepat karena pasal tersebut mengatur pemohon *interim review* yang telah memiliki margin dumping individual dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku untuk mengubah besaran margin dumping individualnya, sehingga dipersyaratkan untuk menjadi pihak kooperatif dalam proses penyelidikan awal.

J. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

65. Berdasarkan hasil penyelidikan, KADI menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan resital 37 – 47 tidak ditemukan margin dumping atas perusahaan asal Thailand yaitu SRF Industries (Thailand) Ltd sebagai Pemohon dalam penyelidikan IR.
- b. Berdasarkan resital 49 – 50, selain A.J. Plast Co., Ltd masih ditemukan adanya praktik dumping yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dari Thailand dan Vietnam, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik dumping masih berlanjut.
- c. Berdasarkan resital 29 – 36, kinerja IDN selama periode 2019 - 2022 Secara umum, kinerja ekonomi IDN telah mengalami perbaikan yang direfleksikan oleh beberapa indikator yang mengalami peningkatan, antara lain penjualan dalam negeri, Harga, Laba operasional, produksi, kapasitas terpasang, utilisasi kapasitas, tenaga kerja, produktivitas, upah, arus kas, dan ROI. Perpanjangan pengenaan BMAD diharapkan dapat mempertahankan kinerja indikator ekonomi IDN yang mengalami perbaikan. Memperpanjang pengenaan BMAD dapat mendorong tercapainya kinerja ekonomi IDN yang semakin stabil.
- d. Berdasarkan resital 52, total impor produk yang diselidiki dari negara dumping selama periode penyelidikan masih menunjukkan peningkatan sebesar 24,7%. Peningkatan impor tersebut diiringi dengan penurunan harga impor dari Thailand sebesar 10,7%. Sebaliknya harga impor dari Vietnam mengalami peningkatan sebesar 8,6% namun harga impor Vietnam tersebut selama periode penyelidikan selalu berada dibawah harga IDN. Selain itu, pangsa pasar dari negara dumping selama periode yang sama mengalami peningkatan sebesar 15%.
- e. Selanjutnya berdasarkan bagian G. Faktor *Recurrence* dan *Likelihood* terjadinya dumping dan kerugian, ditemukan bahwa terdapat peningkatan kapasitas

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW (SR) DAN INTERIM REVIEW (IR) ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) YANG BERASAL THAILAND DAN VIETNAM

terpasang, produksi, utilisasi kapasitas dan persediaan di Thailand yang disebabkan karena adanya industri baru yang memproduksi BOPP sehingga Thailand memiliki *excess capacity* sebesar antara 21% - 42% dan Vietnam sebesar 16% - 31% selama periode penyelidikan sehingga apabila pengenaan BMAD dihentikan, ekspornya akan meningkat kembali.

- f. Pengenaan *trade remedies* dari negara lain terhadap negara dumping oleh Indonesia (Thailand dan Vietnam) yang membuat negara-negara tersebut akan mencari pengalihan pasar ekspornya. Sehingga apabila pengenaan BMAD dihentikan, dumping dan kerugian akan berulang kembali.

66. Berdasarkan kesimpulan hasil penyelidikan pada resital 65, KADI merekomendasikan perpanjangan pengenaan BMAD terhadap impor Bi-Axially Oriented Polypropylene (BOPP) termasuk dalam pos tarif 3920.20.10, 3920.20.91 dan Ex. 3920.20.99 yang berasal atau di impor dari Thailand dan Vietnam dengan besaran sesuai PMK Nomor 36/PMK.010/2019, disertai dengan perubahan yaitu menambah 1 (satu) perusahaan Thailand sebagai berikut:

Tabel 20. Rekomendasi Besaran BMAD

No.	Negara	Nama Perusahaan	Besaran BMAD (%)
1.	Thailand	A.J. Plast Public Company Limited	Tidak dikenakan Bea Masuk Anti Dumping
		SRF Industries (Thailand) Ltd.	Tidak dikenakan Bea Masuk Anti Dumping
		Perusahaan Lainnya	28,4
2.	Vietnam	Formosa Industries Corporation	3,9
		Perusahaan Lainnya	3,9

67. Perpanjangan pengenaan BMAD diusulkan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diundangkan.

Jakarta, 19 Maret 2024

Komite Anti Dumping Indonesia
